

TESIS

**PENGATURAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP
KEPALA DAERAH**

Oleh:

RANDI ZULFIKAR
1720112016



Doesen Pembimbing:

1. Dr. Yuslim, S.H., M.H
2. Dr. Suharizal, S.H., M.H

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
2020**

PENGATURAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP KEPALA DAERAH

**(Randi Zulfikar, 1720112016 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 96 Halaman, Tahun 2020)**

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kepala daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi harus memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konsekuensinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat lagi memberhentikan kepala daerah dengan alasan pertanggungjawabannya ditolak. Mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur di dalam Pasal 68 ayat (2), Pasal 77 ayat (1) dan (2), Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pemberhentian sementara ini terdapat beberapa hak kepala daerah yang dilanggar yaitu hak untuk menjabat selama 5 tahun dan hilangnya hak protokoler, pemberhentian sementara ini juga bertolak belakang dengan asas praduga tak bersalah. Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu Bagaimana Pengaturan Pemberhentian sementara Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah? dan Bagaimana Mekanisme pemberhentian sementara kepala daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian sementara Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Presiden untuk pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian Bupati dan /atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota. Pemberhentian sementara Kepala Daerah dapat dilakukan apabila kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional, menjadi pengurus perusahaan, melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin, dan melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 83 yang harus diawali dengan adanya status seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan. Mekanisme pemberhentian sementara Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pemberlakuan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah menimbulkan akibat hukum yaitu kepala daerah tidak dapat menjalankan hak untuk menjabat selama 5 tahun dan hilangnya hak protokoler karena adanya pemberhentian sementara.

Kata Kunci: Pemberhentian, Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah.

REGULATION TEMPORARY OF THE REGIONAL HEAD

(Randi Zulfikar, 1720112016 Masters of Law, Andalas University Faculty of Law, 96 Pages, 2020)

ABSTRACT

Law Number 23 Year 2014 About the Local Government stipulates that the head of the region are no longer accountable to the Legislative Council but should provide accountability information report to the House of Representatives. Consequently, the Legislative Council can no longer dismiss the head of the area by reason of accountability rejected. Mechanisms dismissal of Regional Head and / or Deputy Regional Head without going through the proposed Legislative Council provided for in Article 68 paragraph (2), Article 77 paragraph (1) and (2), Article 83 paragraph (1) of Law Number 23 2014 on regional Government, the dismissal process while there are some Regional Head rights are violated, namely the right to hold office for five years and forfeiture of protocol, suspension is also contrary to the presumption of innocence. The problem of this thesis is How Setup Regional Head Suspension Based on Law Number 23 Year 2014 About the Regional Government? and How Does the temporary dismissal of the head area Based on Law Number 23 Year 2014 About the Regional Government? , The method used in this study is a normative legal research, which is the research conducted and aimed at the writing of legislation and literature pertaining to This thesis concerns. Research shows that the temporary dismissal of the Head of Region by Law No. 23 of 2014 on Regional Government by the President for the dismissal of the governor and / or the Deputy Governor and Minister of the Interior to process the dismissal of the Regent and / or Vice Regent or Mayor and / or Deputy Mayor , Suspension of Regional Head can be done if the head of the region did not carry out a strategic program of national, became director of the company, to travel out of the country without permission, and committing a crime under article 83 which must begin with the status of a Regional Head who has been designated as a defendant in a criminal. The mechanism of the temporary dismissal of the Regional Head based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government in the enactment of the temporary dismissal of the regional head has a legal consequence that the regional head cannot exercise his right to hold office for 5 years and the loss of protocol rights due to temporary dismissal.

Keywords: Dismissal, Regional Head, Regional Government.